



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2023

LKJIP



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, amanah, Transparan dan Akuntabel dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan bentuk upaya mendorong kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di era reformasi. Tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi sebuah bahan evaluasi kemajuan pembangunan dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Setiap berakhirnya tahun anggaran, maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan tahun 2023. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan LKjIP Dinas perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023. didasarkan pada indikator kinerja yang ada dan ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dilaporkan dalam LKjIP adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada tahun 2023.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari apa yang diharapkan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan ini sangat diharapkan. Terima kasih.



Belopa, Januari 2024
Kepala Dinas Perikanan,

L. BAHARUDDIN

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19650903 199203 1 01 1

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN.....	5
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1. RPJMD TAHUN 2019-2024	10
2.2. RENCANA STRATEGIS	12
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
2.4. PROGRAM PEMBANGUNAN	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
3.2 REALISASI ANGGARAN	23
BAB IV. P E N U T U P.....	33
PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
TABEL.I.1.	KEADAAN PEGAWAI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 BERDASARKAN JABATAN	6
TABEL.I.2.	KEADAAN PEGAWAI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 BERDASARKAN GOLONGAN,	6
TABEL.I.3.	KEADAAN PEGAWAI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	6
TABEL.II.1	INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2019 - 2024.....	16
TABEL.III.1.	TARGET DAN REALISASI PADA INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN	22
TABEL.III.2	PERBANDINGAN REALISASI PADA INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2023-2023.....	23
TABEL.III.3.	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2023.....	24
TABEL.III.4.	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023.....	28

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Dalam kerangka mewujudkan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), yaitu berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akip merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena

itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengelolaan sumberdaya Perikanan Kabupaten Luwu mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan daerah. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Tahun 2019 - 2024 di implementasikan dalam program prioritas sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja dan kebijakan dinas, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen rancangan rencana kerja ini adalah :

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 244 tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 7)
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas perikanan Kabupaten Luwu;
7. Peraturan Bupati Luwu No 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan setiap tahun merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024, dan setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Luwu tersebut. Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana perolehan keberhasilan atas capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu serta pada akhir periode capaian kinerja yang berhasil diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan kepada Bupati Luwu sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Luwu dan pihak yang berkepentingan;
2. Untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, dan
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

a. Tugas Pokok

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Dinas;
2. Penyusunan rencana strategik Dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta staf dalam lingkup Dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Bupati Luwu No. 141 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Luwu didukung Oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang bertugas pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023 sejumlah 64 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 29 orang dan perempuan sebanyak 14 orang, sebanyak 43 ASN dan 21 Orang Non ASN.

Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dapat dilihat dari Tabel I.1

TABEL I.1 Keadaan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023 berdasarkan jabatan

No	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II	1	-	1	100	-	100
3	Eselon III	2	2	4	50	50	100
4	Eselon IV	2	1	3	50	33	100
5	Pejabat Fungsional	6	3	9	66	33	100
6	JFT	-	2	2	-	100	100
7	Staf ASN	16	6	22	72	27	100
8	Staf Non ASN	10	11	21	47	52	100
	Jumlah	37	25	62	385	295	700

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023

TABEL I.2 Keadaan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023 berdasarkan Tingkat Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini

No	Golongan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	IV	3	2	5	60	40	100
2	III	21	12	33	63	37	100
3	II	6	1	7	86	14	100
4	PTT	7	9	16	44	56	100
	Jumlah	29	24	53	253	147	400

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023

TABEL I.3 Keadaan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	SD	0	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0	0
3	SMA	5	0	6	83	0	100
4	D3	0	0	0	0	0	0
5	S1	21	12	33	63	36	100
6	S2	2	0	2	100	0	100
	Jumlah	28	12	41	246	36	300

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang merupakan bukti pendukung yang pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan

LKjIP ini sehingga dapat menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja dinas perikanan Kabupaten Luwu yang telah dicanangkan pada tahun 2023 agar berhasil dicapai.

1.6 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD

- 2 Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Potensi sektor Perikanan menjadi salah satu modal dasar pembangunan Kabupaten Luwu. Hal ini dibuktikan dengan panjang garis pantai 139,92 Km. Dari total 22 wilayah kecamatan yang terdiri dari 227 Kelurahan dan Desa, dimana 11 Kecamatan diantaranya berada di wilayah pesisir dengan 45 Desa/Kelurahan. Mata pencaharian masyarakat terdiri dari nelayan sebanyak 4.434 orang, pembudidaya air payau 7.889 orang, dan pembudidaya air tawar 5.338 orang, pembudidaya laut 3.150 orang, pengolah hasil perikanan 1.200 orang, dan pemasar hasil perikanan 458 orang.

Kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan oleh masyarakat adalah budidaya air payau, budidaya laut dan budidaya air tawar. Total potensi lahan untuk kegiatan budidaya perikanan seluas 19.434,37 Km², terdiri dari lahan tambak seluas 11.535,48 Ha, lahan pemeliharaan ikan air tawar (mina padi dan kolam) 2.523,49 Ha, dan perairan pantai 15.000 Ha. Luas areal pertambakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sampai dengan tahun 2023 adalah 10.525,50 Ha yang tersebar pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan. Komoditas yang dibudidayakan antara lain rumput laut *Gracillaria sp*, ikan bandeng dan udang windu. Budidaya ikan di air tawar untuk jenis ikan mas (*Ciprinus carpio*), ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dan ikan lele (*Clarias gariepinus*) banyak dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan persawahan/kolam. Luas areal budidaya ikan di air tawar yang dikelola oleh masyarakat untuk lahan Kolam seluas 79,49 Ha dan lahan sawah seluas 2.444,00 Ha. Dalam rangka menggairahkan minat masyarakat untuk melaksanakan usaha budidaya ikan di air tawar, Pemerintah Kabupaten Luwu menyediakan 4 unit Balai Benih Ikan (BBI) yaitu BBI Bajo di Kelurahan Bajo, BBI Karetan di Baramamase, BBI Lamasi di Kelurahan Lamasi, dan BBI Rante Damai di Desa Rante Damai. Sedangkan kegiatan budidaya laut telah berkembang di Kecamatan Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Kamanre, Belopa Utara, Belopa, Suli, Larompong dan Larompong Selatan.

Komoditas utama yang dibudidayakan adalah rumput laut *Eucheuma cottonii*. Total luas pemanfaatan lahan tahun 2023 seluas 18.517,24 Ha. Kegiatan usaha penangkapan ikan pada tahun 2023 terdapat di 11 wilayah kecamatan pesisir, dengan

jumlah nelayan sebanyak 4.319 orang. jumlah perahu/kapal penangkap ikan pada tahun 2023 berjumlah 2.169 unit, perahu motor tempel 1.330 unit, dan kapal motor sebanyak 835 unit. Umumnya kapal motor berkapasitas 1 – 5 gross ton (GT). Jumlah alat tangkap sebanyak 2.169 unit. Peralatan yang banyak digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan adalah bagan apung, huhate, jaring insang, pancing, pukot cincin, rawai tetap, pancing ulur, dan sero. Adapun jumlah hasil produksi perikanan tangkap sebanyak 56 jenis ikan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, maka pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Luwu diarahkan pada upaya pemeliharaan sumberdaya alam, pengembangan usaha budidaya laut, budidaya air tawar dan budidaya air payau, usaha penangkapan ikan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana agribisnis dan agroindustri serta penguatan kelembagaan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

2.1. RPJMD Tahun 2019 - 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran dimasa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau instansi pemerintah dan dijelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi focus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap asepek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu periode 2019-2024 adalah:

**LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA
DALAM NUANSA RELIGI"**

Masing-masing elemen pada visi tersebut diatas menagndung makna. Luwu, Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya kabupaten Luwu dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu. Penjabaran Visi Kabupaten Luwu Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- Luwu sebagai daerah yang **Maju**, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, keadaan soseial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap.
- Luwu sebagai daerah yang **Mandiri**, Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola ptensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia.
- Luwu sebagai daerah yang **Sejahtera**, mengandung makna dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- Luwu sebagai daerah yang **Religi**, Mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajarana agama dan pengalaman agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu

Tahun 2019-2024, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius.
7. Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik.
10. Mewujudkan keijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta penanggulangan Bencana.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan alat bantu dalam mengukur efektivitas dari kinerja sumberdaya manusia pada instansi bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor : 589/IX/Y/99, Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan masalah yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

2.1.1 Strategi

Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, dan untuk mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu, strategi pembangunan yang ditempuh dalam mencapai visi dan misi adalah:

1. Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir melalui penciptaan lapangan kerja baru/alternatif untuk memacu pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal;
2. Pengembangan kawasan budidaya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi budidaya perikanan;
3. Penerapan teknologi pada usaha perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Perikanan melalui pengembangan pola pembinaan berbasis kelompok bagi nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya;
5. Menjaga kelestarian sumberdaya Perikanan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem perairan serta memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya Perikanan;
6. Mengembangkan konsep partisipatif bersama seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan.

2.1.2. Kebijakan

Dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya Perikanan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Luwu, adalah:

1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
2. Mengembangkan perikanan budidaya (komoditas unggulan) yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan;

4. Mengembangkan usaha penanganan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada di tingkat masyarakat;
5. Peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta penguatan kelembagaan;
6. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya Perikanan;
7. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya ikan beserta ekosistemnya;
8. Membangun koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

2.1.3. Visi dan Misi

Dalam pembangunan Perikanan, khususnya di Kabupaten Luwu, keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dengan kelestarian sumberdaya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Potensi sumber daya Perikanan tidak hanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat saat ini, akan tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Olehnya itu, visi pembangunan Perikanan 5 (lima) tahun (2019-2024) adalah **“Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Secara Optimal dan Berkelanjutan Bagi Kesejahteraan Masyarakat.”** Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat Perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan Perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan yang berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan/pemerataan (equity), pertumbuhan (growth), dan berkelanjutan (environmental sustainability).

Berdasarkan visi tersebut di atas, misi pembangunan di bidang Perikanan Kabupaten Luwu adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat pesisir;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat pesisir lainnya melalui peningkatan produktivitas, mutu produksi dan pengembangan kegiatan usaha perikanan;
3. Peningkatan kontribusi sektor Perikanan sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi daerah, regional maupun nasional melalui pengembangan kemitraan dengan investor dari dalam dan luar negeri;
4. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumberdaya Perikanan.

2.1.4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan hidup dan kemandirian nelayan dan pembudidaya.
2. Peningkatan jumlah produksi perikanan, produktifitas usaha dan mutu hasil – hasil perikanan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
3. Pengembangan potensi dan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan pembinaan dan pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya Perikanan;
5. Terwujudnya kelembagaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
6. Terwujudnya kondisi lingkungan sumberdaya Perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung;
7. Peningkatan peran sektor Perikanan dalam perekonomian daerah dan nasional.

b. Sasaran

Sedangkan indikator-indikator sasaran pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 2,5% pertahun.
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1% pertahun.
3. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan sebesar 0,3% pertahun.
4. Meningkatnya pembinaan kelompok usaha perikanan sebesar 20 kelompok pertahun.
5. Meningkatnya produksi perikanan kelompok nelayan.
6. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita sebesar 1% per tahun.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam menetapkan rencana kinerja tahunan

serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Luwu dimana dalam pelaksanaannya dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah disajikan pada **Tabel II.1**

**TABEL II.1. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA
MENENGAH TAHUN 2019-2024**

NO	TUJUAN/SASARAN		REALISASI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023	TAHUN 2024
(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,73	2,50 - 4,50	2,50 - 4,50
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	(1,01)	3,00 - 4,99	3,00 - 4,99
2.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	n.a	1,00	1,00
		Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	n.a	1,00	1,00

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam menetapkan rencana kinerja tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama adalah implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Luwu dimana dalam pelaksanaannya dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari adanya target kinerja pada tahun 2019-2024 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai dengan cara melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan yang digagas oleh pemerintah agar tercapainya realisasi.

2.4 Program Pembangunan

Sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan visi dan misi, maka strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasi ke dalam program pembangunan sebagai berikut :

a. Program Utama

1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produktifitas usaha hasil produksi perikanan melalui kegiatan Promosi Produk Olahan Hasil Perikanan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan meningkatkan produktifitas usaha budidaya perikanan melalui kegiatan pengembangan usaha budidaya air tawar dan air payau serta pengelolaan Kawasan perikanan budidaya.

3. Program Pemberdayaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan produktifitas usaha nelayan melalui kegiatan Pengembangan sarana penangkapan ikan, pembangunan/pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI) serta pengelolaan tempat pendaratan ikan.

b. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini terdiri dari 11 Kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan melalui peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan, meningkatkan kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas- tugas dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan serta meningkatkan dukungan operasional kedinasan dengan menyediakan sarana dan prasarana kerja demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis/operasional kedinasan.

Pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan- kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

**Tabel Program Utama dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023**

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SKPD, - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian - Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	- Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan dalam laporan pengukuran kinerja ini diuraikan kinerja Program dan Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023 telah ditetapkan pada sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuan yang tercakup dalam program yang tersebar dalam beberapa kegiatan.

Analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang mencakup pada beberapa sasaran strategis telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disajikan berdasarkan sistematika pernyataan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini :

MISI	SASARAN	TUJUAN
Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat pesisir lainnya melalui peningkatan produktivitas, mutu produksi dan pengembangan kegiatan usaha perikanan.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi disektor perikanan

TABEL III.1 Target dan realisasi pada indikator kinerja dinas perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	691.592,88	665.421,08
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.634,75	18.970,50
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	684.745,43	646.450,58
3.	Pertumbuhan IKM Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	156,19	251,37
4.	Persentase Pertumbuhan IKM Pemasaran Hasil Olahan Perikanan	%	1	1

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dimana Produksi Perikanan sebesar 96,22%. Data tersebut merupakan laporan produksi dari Dinas Perikanan yang meliputi produksi perikanan tangkap, budidaya serta hasil olahan ikan dengan target capaian tahun 2023 untuk jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 684.745,43 ton, jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 18.634,75 ton sedangkan target untuk hasil olahan perikanan yaitu 156,19 ton. Adapun realisasi pada tahun 2023 jumlah produksi perikanan mencapai 667.029,28 ton diantaranya pada produksi hasil budidaya sebanyak 646.450,58 ton dan produksi perikanan tangkap sebanyak 18.970,50 ton sedangkan realisasi produksi hasil olahan perikanan sebanyak 251,37 Ton .

Pembandingan yang dilakukan antara realisasi dengan target menunjukkan bahwa semua target belum sepenuhnya terealisasi. Dimana pada produksi perikanan budidaya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sehingga untuk mencapai target produksi berikutnya, dapat melalui kerjasama yang baik dari semua pihak (stakeholder) yang terkait sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan berjalan dengan baik memberikan hasil dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produktivitas perikanan secara umum. Hasil yang dicapai pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 Perbandingan realisasi pada Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023 Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	667.029,28	665.421,08
	Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.842,95	18.970,50
	Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	647.981,05	646.450,58

Dari tabel di atas terlihat Realisasi secara umum antara tahun 2022 dengan 2023 menunjukkan jumlah hasil produksi perikanan yang menurun, dimana pada produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 realisasinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 646.450,58 Ton. Sedangkan untuk hasil perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18.970,50 Ton. Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pada Tahun 2023 telah menetapkan program sebagai pendukung indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu berjalan dengan baik, keberhasilan capaian sasaran saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun yang akan datang.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian misi strategis yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu. Sebagai bahan Akuntabilitas Keuangan

dibawah ini disajikan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis guna mencapai tujuan, sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023. Sebagaimana yang telah dikemukakan tentang rencana Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan Tujuan yang tercakup dalam Program pada beberapa kegiatan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.549.792.030,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah) hingga berakhirnya tahun anggaran 2023 telah terealisasi sebesar 15.471.197.530 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

TABEL III.3.

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target kinerja Tahun 2023	Realisasi kinerja Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 1. Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100%

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56	56	100%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	OB	1087	1087	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	2	2	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	11	6	55%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	6	50%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	6	50%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	1	1	100%
		Penyediaan Bahan Material	Bulan	12	12	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OK	500	500	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	1	1	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	1	1	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	6	100%
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	unit/set	20	20	100%
Meningkatnya Produktivitas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18.634,75	18.180,25	18.970,50	101%
1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100%
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	1	1	100%
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	66	64	97%
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	TPI	4	4	100%
		Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	TPI	4	4	100%
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	TON	684.745,43	646.450,58	100%
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100%	100%	100%
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	5	5	100%
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Unit/paket	55	55	100%
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Ekor	900000	900000	
Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	156,19	251,37	160%
1. Persentase Pertumbuhan Pengolahan Perikanan		Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi	4	4	100%

		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota		1	1	100%
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	4	2	50%

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023.

TABEL III.4.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	4.471.814.030	4.349.797.936	97%
3.25.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.333.700	70.332.300	99%
3.25.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.905.000	15.576.600,00	98%
3.25.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.678.000	10.357.400,00	97%
3.25.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.696.000,00	7.636.000,00	99%
3.25.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.948.700,00	12.818.700,00	99%
3.25.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.629.000,00	11.559.000,00	99%
3.25.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.908.000,00	5.848.000,00	99%
3.25.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.569.000,00	6.536.600,00	100%
3.25.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.872.707.380,00	3.764.273.536,00	97%

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.638.397.380,00	3.529.963.536,00	97%
3.25.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	234.310.000,00	234.310.000,00	100%
3.25.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	100%
3.25.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000,00	8.400.000,00	100%
3.25.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.220.000,00	10.720.000,00	81%
3.25.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.220.000,00	10.720.000,00	81%
3.25.01.2.06		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	293.104.450,00	286.407.300,00	98%
3.25.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.423.500,00	3.413.800,00	100%
3.25.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.579.200,00	4.577.900,00	100%
3.25.01..2..06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.889.000,00	7.720.000,00	98%
3.25.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000,00	8.160.000,00	57%
3.25.01..2.06.07		Penyediaan Bahan Material	66.757.750,00	66.729.100,00	100%

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.055.000,00	195.806.500,00	1,00
3.25.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.022.000,00	159.702.800,00	98%
3.25.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.222.000,00	27.902.800,00	89%
3.25.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.800.000,00	131.800.000,00	100%
3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.026.500,00	49.962.000,00	100%
3.25.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.726.500,00	45.667.000,00	100%
3.25.01.2.09.02		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	4.295.000,00	100%
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.802.418.000,00	3.158.254.516,00	83%
3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.778.418.000,00	3.134.254.516,00	100%
3.25.03.2.01 .02		Peyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.799.000.000,00	1.629.436.000,00	91%
3.25.03.2.01 .03		Penjaminan Ketersediaan Sarana UsahaPerikanan Tangkap	1.979.418.000,00	1.504.818.516,00	76%

No.	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Tingkat Capaian Kinerja (%)
3.25.03.2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	24.000.000,00	100%
3.25.03.2.03 .02		Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00	24.000.000,00	100%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	7.860.626.000,00	7.550.968.078,00	96%
3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	7.860.626.000,00	7.550.968.078,00	96%
3.25.04.2.04.02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.064.350.000,00	1.933.207.800,00	94%
3. 25. 04. 2. 04. 03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	5.796.276.000,00	5.617.760.278,00	97%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi dan Pengolahan Pemasaran Perikanan	414.934.000,00	412.177.000,00	99,34%
3.25.06.2.03		Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	414.934.000,00	412.177.000,00	99,34%
3.25.06.2.03.01		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Komsumsi dan usaha Pengolahan dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.754.000,00	98,77%
3.25.06.2.03.02		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.934.000,00	392.423.000,00	99,36%
JUMLAH			16.549.792.030	15.471.197.530	93,48%

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Akuntabilitas kinerja juga dibarengi dengan akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pada Tahun 2023 dengan total Anggaran sebesar Rp. 16.549.792.030,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah) untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Dari jumlah anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 15.471.197.530 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 93,48%.

3.3 Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Tahun anggaran 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu menganggarkan belanja Operasi sebesar Rp. 13.771.859.030 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.925.302.530 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Menganggarkan belanja Modal sebesar Rp. 2.777.933.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 2.545.895.000 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalam melaksanakan pembangunan tahun 2019. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Dinas Perikanan untuk mewujudkan Visi, dan misi yang telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang tercermin dari indikator sasaran Pembangunan Perikanan yang dilaksanakan dalam 4 (Empat) program.

Indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 tersebut merupakan parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam menyelenggaraan pemerintahan yang merupakan komitmen instansi pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Alokasi anggaran belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang tersedia melalui APBD Kabupaten Luwu tahun 2023 untuk pelaksanaan Kinerja tersebut adalah sebesar 16.549.792.030,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah). Dikaitkan dengan pencapaian sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan menyerap anggaran yakni Rp. 15.471.197.530 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau sebesar 93,48 %, Penyerapan anggaran ditahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 99,14%. Untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Luwu serta Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dapat dijelaskan bahwa dari Anggaran sebesar sebesar 16.549.792.030,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah) dialokasikan untuk belanja Operasi sebesar Rp. 13.771.859.030 (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah). Belanja Modal sebesar Rp. 2.777.933.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu ditahun mendatang, maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain :

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana kegiatan yang diikuti pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan lebih berhasil guna dan berdaya guna;
2. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Lebih meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu;
4. Agar Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dapat memberikan informasi yang memadai perlu dilakukan berbagai perbaikan terhadap pengumpulan data dan informasi yang diperlukan khususnya terkait dengan sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu kepada Bupati Luwu selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dimasa datang.